



## **STRATEGI PERTAHANAN MARITIM DI LAUT NATUNA UTARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA**

**Bambang Hadiwijaya**

Operasi Laut, Seskoal, Indonesia

### **Abstrak**

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis, perkembangan lingkungan strategis global dan regional, serta semakin berkembangnya ancaman yang dihadapi oleh Indonesia di laut natuna utara, maka diperlukan suatu konsep pertahanan maritim yang kuat sebagai cerminan kebijakan politik Indonesia sebagai negara kepulauan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Tidak maksimalnya strategi pertahanan di Laut Natuna Utara saat ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu a) Kemampuan Teknologi Komando, Kendali, Komputer, Komunikasi, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP) yang belum optimal, b) Penerapan strategi pertahanan maritim TNI Angkatan Laut belum didukung gelar kekuatan yang optimal, c) Pembangunan sarana prasarana dalam mendukung gelar kekuatan di laut Natuna yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kementerian Pertahanan RI saat ini sedang menata kembali kekuatan pertahanan negara melalui program A New Force Design and Structure atau Postur Pertahanan Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Dalam studi kepustakaan, data dan informasi dikumpulkan serta dianalisis untuk memahami fenomena yang dikaji.

**Kata Kunci:** Laut Natuna utara, Strategi pertahanan maritim, Poros maritim dunia.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dengan konstelasi geografis perairan yang cukup luas telah memberikan tantangan tersendiri bagi pengamanan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan ruang wilayah yang besar dan luas cakupannya ini menghadirkan kompleksitas bagi pertahanan maritim Indonesia. Kejahatan transnasional baik berupa ancaman militer dan nonmiliter maupun nonmiliter yang berbentuk aktual dan potensial serta hibrida sekalipun sangat besar kemungkinannya akan datang dan hadir melalui beberapa jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan corong strategis berikut ruang udara yang terdapat di atasnya (Mabesal, 2016). Dari beberapa bentuk ancaman yang nyata dan potensial tersebut khususnya di Laut Natuna Utara seharusnya Indonesia mengembangkan kemampuan pertahanan maritimnya untuk menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal baik dari luar maupun dalam negeri. Konsekuensi adalah bila pertahanan maritim gagal untuk menghadapi ancaman tersebut maka akan berpengaruh terhadap pertahanan negara Indonesia secara umum dan keseluruhan (Subijanto, 2005). Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang telah dipublikasikan di dunia internasional oleh Indonesia memiliki nilai nyata bagi kebijakan pertahanan negara atau nasional. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia (RI) yang berusaha untuk menjadikan sektor maritim sebagai prioritas pembangunan nasional melalui kelima pilar PMD telah memberikan ide dan gagasan bagi perkembangan strategi pertahanan maritim Indonesia dimana strategi yang dibangun dan dikembangkan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pertahanan negara yang ada. Dengan berkembangnya strategi pertahanan maritim yang mendukung kebijakan pertahanan

negara dalam menghadapi kejahatan transnasional diharapkan akan mampu untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Secara geografis, perairan Laut Natuna Utara memiliki arti strategis baik ditinjau dari segi lalu lintas pelayaran serta memiliki wilayah perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Laut Cina Selatan merupakan jalur pengiriman barang lewat laut tersibuk kedua di dunia. Setiap tahunnya, lebih dari setengah lalu lintas super tanker dunia melalui jalur Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok menuju ke Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Laut China Selatan memiliki lebih dari 250 pulau dan terumbu karang yang sebagian besar tidak berpenduduk, bahkan terendam ketika air pasang. Perairan tersebut dikelilingi sepuluh negara pantai, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Perairan Laut China Selatan, Taiwan, Teluk Tonkin, Teluk Siam, Selat Singapura Kepulauan Natuna, dan Laut Sulu serta Kepulauan Filipina. Strategi pertahanan maritim yang diterapkan di Laut Natuna Utara dikaitkan dengan potensi ancaman yang akan dihadapi menurut Panglima TNI, pada dasarnya TNI menerapkan strategi pertahanan berlapis yang mencakup strategi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Strategi penangkalan bertujuan untuk mewujudkan kesiapsiagaan segenap kekuatan dan kemampuan serta gelar TNI yang mampu memberikan dampak psikologi dengan mewujudkan efek tangkal yang tangguh, baik keluar maupun kedalam. Strategi penindakan bertujuan untuk dapat menindak setiap ancaman yang mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dilaksanakan dalam bentuk operasi tempur untuk menghancurkan musuh di negaranya, dalam perjalanan dan yang

telah berhasil memasuki wilayah nasional dengan menggunakan strategi perang berlarut. Adapun strategi pemulihan adalah strategi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi stabilitas keamanan dan kepercayaan masyarakat yang dilakukan antara lain melalui pembinaan, rekonstruksi dan rehabilitasi. Pada saat ini strategi tersebut masih belum maksimal dalam menjaga wilayah perairan di Laut Natuna Utara, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menurut Hasjim Djalal, kawasan Asia Pasifik, khususnya Laut Cina Utara merupakan wilayah yang menjadi pusat perebutan pengaruh dan kepentingan dua kekuatan besar (Prabowo, 2013). Pemerintah Indonesia hendaknya membangun Pangkalan TNI Angkatan Laut dan kapal perang serta pesawat udara di sekitar Kepulauan Natuna, sehingga penggelaran kekuatan dapat dilaksanakan secara maksimal di wilayah tersebut. Tidak maksimalnya strategi pertahanan di Laut Natuna Utara saat ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu a) Kemampuan Teknologi Komando, Kendali, Komputer, Komunikasi, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP) yang belum optimal, b) Penerapan strategi pertahanan maritim TNI Angkatan Laut belum didukung gelar kekuatan yang optimal, c) Pembangunan sarana prasarana dalam mendukung gelar kekuatan di laut Natuna yang belum optimal.

Secara global perkembangan lingkungan strategis mengerucut kepada 2 (dua) kekuatan negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Cina yang telah membawa perubahan cukup signifikan pada era saat ini. Strategi kebijakan luar negeri sementara pemerintahan Joe Biden yang dirilis awal bulan ini menyebut bahwa China yang "lebih tegas" adalah satu-satunya pesaing AS yang bisa menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk terus-menerus menjadi

penantang kekuatan global yang stabil dan terbuka (kemhan RI, 2014). Sedangkan Cina dengan kebijakan *Grand Strategy*, yaitu *One Belt One Road* (OBOR) berusaha untuk terus meningkatkan hegemoni mereka di bidang perekonomian dunia. Situasi ini telah berdampak pada perkembangan situasi regional dan nasional Indonesia. Perkembangan saat ini yang sedang terjadi dalam konteks regional dan nasional adalah situasi sengketa Laut Cina Selatan yang memasuki babak baru dimana pemerintah RI telah memutuskan untuk memperkuat kehadiran militernya di Natuna. Wilayah Natuna dimana Cina sebelumnya tidak melakukan klaim terhadap perairan dan kepulauan di sekitarnya saat ini telah menunjukkan ancamannya terhadap kedaulatan Indonesia. Komponen utama pertahanan negara, TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI AL, dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) telah menyusun rencana kontinjensi untuk meningkatkan dan memperkuat pertahanan di wilayah ini. Dengan perkuatan yang ditunjukkan oleh Indonesia di Natuna ini diharapkan mampu untuk memberi sinyal peringatan kepada Cina agar tidak melakukan tindakan provokatif di daerah tersebut. Lebih jauh lagi, Kementerian Pertahanan RI saat ini sedang menata kembali kekuatan pertahanan negara melalui program *A New Force Design and Structure* atau Postur Pertahanan Baru. Dalam hal mewujudkan kebijakan PMD di atas maka Pemerintah perlu memperhatikan pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang berorientasi pada penetapan kebijakan strategi pertahanan maritim nasional, peningkatan Kemampuan Teknologi Komando, Kendali, Komputer, Komunikasi, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP), dan pembangunan sarana prasarana dalam mendukung menggunakan teori strategi dalam pembangunan kekuatan pertahanan

maritim maka diperlukan suatu konsep pertahanan negara di laut yang kuat sebagai cerminan kebijakan politik Indonesia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan konsep teori tentang strategi yang disampaikan oleh Arthur Lykke Jr, mengembangkan konsep kerangka strategi yang meliputi *ends*, *ways*, dan *means*. Bagi Lykke, strategi merupakan suatu ekspresi koheren dari suatu proses yang mengidentifikasi *ends* (tujuan), *ways* (cara) dan *means* (sumber daya) (Lykke, 2014). Secara matematis, Lykke merumuskan strategi = *ends + ways + means*. *Ends* merupakan tujuan atau hasil yang diinginkan dari strategi yang dilakukan. Dengan demikian perlu adanya suatu strategi (*Ends, Mens, Ways*) Strategi pertahanan maritim (*Ways*) dalam mengoptimalkan membangun kekuatan pertahanan maritim guna menghadapi ancaman kejahatan transnasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dalam Strategi Pertahanan Maritim di Laut Natuna Utara dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu teori Strategi yang disampaikan oleh Arthur Lykke Jr, mengembangkan konsep kerangka strategi yang meliputi *ends*, *ways*, dan *means*. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh beberapa teori yaitu teori Sea Power, teori Pengendalian Laut dan teori Logistik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai referensi

pembandingan yaitu penelitian dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan strategi Indonesia dalam menyelesaikan konflik di laut natuna utara.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara dalam menangkal dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang pertahanan negara sebagai aturan penuntun dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pada tataran politik, kebijakan di bidang pertahanan negara yang diatur dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang memberikan petunjuk dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan fungsi pertahanan negara.

Kondisi pembangunan kekuatan pertahanan maritim saat ini mendorong bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan maritim di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Dalam menyikapi kondisi tersebut maka diperlukan cara pandang seluruh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan maritim, termasuk di dalamnya adalah peran komponen kekuatan pertahanan maritim yang terdiri dari:

- a. Kekuatan dan kemampuan Angkatan Laut;
- b. Armada kapal-kapal instansi pemerintah termasuk pesawat udara maritim dan kapal-kapal riset serta pemetaan;
- c. Armada niaga nasional;
- d. Armada perikanan nasional;

- e. Pangkalan-pangkalan pendukungnya, termasuk pangkalan udara;
- f. Pelabuhan-pelabuhan dan fasilitasnya;
- g. Industri dan jasa maritim; dan
- h. Komponen cadangan dan pendukung yang digunakan dalam tugas penegakkan kedaulatan dan hukum di laut.

Pada pokok pembahasan pembangunan kekuatan pertahanan maritim ini akan dibatasi pada kekuatan dan kemampuan TNI AL dan komponen cadangan maupun pendukung secara umum dalam tugas penegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Saat ini telah berjalan proses pembangunan kekuatan pertahanan maritim nasional dimana hal tersebut memberikan pengaruh pada hubungan Indonesia dengan beberapa negara di tingkat global, regional, dan nasional. Salah satu contoh perkembangan yang terjadi di Kawasan regional dan global adalah konflik sengketa wilayah Laut Cina Selatan (LCS), dimana Indonesia telah membangun kekuatan pertahanan maritimnya melalui perkuatan militer di Natuna. Indonesia mengambil keputusan tersebut untuk menanggapi ancaman Cina terhadap klaim wilayah kedaulatan di sekitar perairan dan pulau ini. Hal ini diperkuat dengan kebijakan nasional untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di bidang maritim, sebagaimana isi pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada saat menegaskan bahwa Indonesia ingin tetap menjadi “perantara yang jujur” dalam sengketa ini dan “tidak ada alasan” untuk terlibat secara langsung. Pernyataan di atas diperkuat oleh keterangan dari Menteri Pertahanan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia sedang dirapikan guna mengawasi dan menegaskan kedaulatan serta akan menerapkan aturan pelibatan

yang ketat terhadap penggunaan senjata dari peralatan perang yang ada di wilayah Natuna (Bhatnagar, 2016).

Strategi pertahanan maritime tidak terlepas dari kekuatan laut Indonesia dimana agar kita dapat kembali berjaya di laut, maka Indonesia harus mampu menjawab tiga hal mendasar yaitu sasaran/tujuan apa yang ingin diwujudkan (*ends*), dengan sarana prasarana apa untuk mewujudkan tujuan (*means*) serta bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan tersebut (*ways*).

### **1. Penetapan kebijakan strategi maritim Nasional.**

Dalam penyusunan suatu konsep strategi maritim negara manapun tidak ada yang sama, karena instrumen yang dimiliki berbeda dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi geografik serta sistim politik negara bersangkutan. Demikian pula dengan Indonesia, yang memiliki kekhususan tersendiri ditinjau dari segi geografi yaitu pada posisi silang dunia yang cukup yang strategis .

Peran universal TNI AL diharapkan relevan dengan strategi pertahanan maritim karena institusi ini sebagai unsur pertahanan yang menjadi ujung tombak sebagai negara maritim. Dalam hal ini TNI AL berjalan pada dua strategi dasar yaitu pengendalian maritim dan proyeksi kekuatan, dan ini bisa dijadikan level minor pada pertahanan maritim. Kajian terhadap Doktrin Eka Sasana Jaya berkelanjutan sangat relevan karena aplikasi dari doktrin ini mampu untuk menemukan pola Pertahanan Maritim Indonesia (Kemhan RI, 2016). Apabila Strategi militer Maritim Indonesia dalam tataran sistem keamanan telah terlaksana, maka peran, misi dan tugas operasional TNI AL sebagai komponen utama kekuatan maritim maka pengembangan dan pembangunan di sektor maritim akan terlaksana dengan aman dan lancar dalam upaya pembangunan bangsa

Indonesia yang berporos maritim. Doktrin maritim merupakan turunan dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan strategi adalah bentuk konkrit dari kandungan doktrin. Dengan demikian apabila kita telah memiliki doktrin maritim Indonesia, kemudian diterbitkannya Strategi Militer Maritim Indonesia akan mencerminkan bahwa dokumen tersebut merupakan turunan dari doktrin yang dianut. Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan menguatnya isu *Maritime Security*, maka Indonesia akan melaksanakan transformasi dari status negara berkembang menuju negara maju. Strategi maritim yang akan disusun ini dipandang akan mampu mengamankan aspirasi kepentingan nasional Indonesia yang masih berstatus negara berkembang. Namun dalam beberapa puluh tahun mendatang, maka Bangsa Indonesia statusnya akan meningkat menjadi negara maju.

Konsep pertahanan negara di laut yang kuat diharapkan dapat terwujud sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Konsep pertahanan negara sendiri disusun dengan mengedepankan konsep pertahanan berlapis, yaitu konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Konsep pertahanan negara yang bersifat pertahanan berlapis memiliki tujuan untuk penangkalan, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer atau nirmiliter dan untuk tujuan menghadapi perang berlarut

a. Fungsi penangkalan merupakan strategi yang dilaksanakan pada masa damai, dan merupakan integrasi usaha pertahanan, yang mencakup instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi dan militer

Strategi penangkalan membutuhkan kekuatan pertahanan yang memiliki kredibilitas tinggi yang

bertumpu pada kekuatan militer yang handal dan disegani serta kebijakan pemerintah yang tegas dan akuntabel dalam penggunaan kekuatan pertahanan untuk melindungi kepentingan nasional. Secara ringkas kredibilitas penangkalan adalah kombinasi dari kemampuan (*capability*) dan keinginan (*willingness*). Dalam strategi pertahanan maritim Indonesia, kredibilitas kemampuan untuk melakukan penangkalan dapat dibentuk dengan membangun kekuatan pertahanan yang memiliki keunggulan dari lawan potensial, baik dari aspek teknologi, daya pukul, maupun daya gerak.

Kemampuan pertahanan yang handal tersebut dikonversikan menjadi daya tangkal pertahanan melalui penggelaran sebagai bentuk kehadiran (*presence*), baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendemonstrasikan kemampuan kekuatan pertahanan Indonesia. Kredibilitas penangkalan juga dibangun melalui keterlibatan aktif unsur-unsur TNI dalam operasi perdamaian dunia, latihan-latihan dan patroli bersama dengan negara lain, maupun kegiatan pertukaran personel dalam pendidikan maupun latihan yang dapat menjadi indikasi kemampuan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Di dalam buku Strategi Pertahanan Negara (Kementerian Pertahanan RI, 2007) disebutkan bahwa pada konsep penangkalan terdapat dua macam strategi penangkalan, Penggunaan strategi pengendalian laut juga digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi penangkalan dalam konsep pertahanan negara. Penyelenggaraan strategi pengendalian laut dilaksanakan dengan pola operasi Siaga Tempur Laut, yang dilaksanakan pada wilayah yang memiliki potensi konflik atau disebut juga perairan rawan selektif seperti perairan Natuna utara. Pola operasi lainnya dalam strategi ini

yaitu operasi laut sehari-hari dalam bentuk operasi keamanan.

b. Pengendalian laut (*Sea control*). Rear Admiral Henry Eccles dari *US Naval War College* dalam teorinya mengenai pengendalian laut menulis sebagai berikut:

- 1) *Absolute control*.  
Bahwa pihak yang menguasai laut memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan laut tanpa gangguan pihak lawan.
- 2) *Exercising control*. Dalam klasifikasi ini pihak yang mengendalikan laut memiliki kemampuan untuk menggunakan sebagian laut tertentu dengan derajat kebebasan yang tinggi.
- 3) *Disputing control*. Disini kedua pihak yang bermusuha dapat menggunakan laut yang sama menggunakan laut yang sama tetapi masing-masing menanggung resiko yang sama besarnya.

Era revolusi industri saat ini memungkinkan integrasi dari unsur-unsur yang dilibatkan dalam gelar pengendalian laut. Gambaran situasi baik udara, permukaan dan bawah air dapat diperoleh secara utuh dari berbagai sensor yang dimiliki sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan penindakan secara cepat dan tepat. Selain mengintegrasikan kemampuan yang bersifat spesifik matra di atas, teknologi 4.0 juga dibutuhkan untuk mengintegrasikan kemampuan dasar yang bersifat gabungan (*joint capabilities*) sebagai prasyarat (*enablers*) untuk pelaksanaan strategi pengendalian laut, yaitu kemampuan intelijen, pengintaian dan pengawasan strategis dan taktis kemampuan logistik

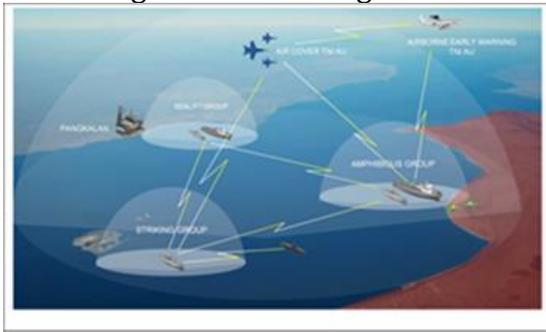
c) Proyeksi kekuatan (*Power projection*). Ken Booth mengatakan bahwa Angkatan Laut secara umum (*universal*) mempunyai tiga peran dalam melaksanakan tugasnya yaitu: Peran Militer (*Military*), Peran Diplomasi (*Diplomacy*), Peran Polisionil (*Constabulary*).<sup>10</sup> Penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata.

Penggunaan kekuatan dilaksanakan untuk menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara Hanneg dan penangkalan melalui penyiapan Kekuatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyeksi kekuatan adalah kekuatan gabungan TNI yang memiliki kemampuan untuk beroperasi bersama (*interoperability*), memiliki jangkauan jauh, dan didukung tiga kemampuan dasar:

- 1) Dukungan logistik.  
Kemampuan melaksanakan proyeksi kekuatan bertumpu pada kemampuan dukungan logistik yang dimiliki oleh pangkalan-pangkalan dan kemampuan untuk melaksanakan pembekalan ulang secara berkesinambungan sepanjang pelaksanaan operasi.
- 2) Sistem komando dan kendali terintegrasi yang memiliki rentang kendali efektif jarak jauh. Penggunaan kekuatan nasional dalam proyeksi kekuatan memiliki implikasi adanya jarak yang panjang antara pusat kendali dan kekuatan yang melaksanakan proyeksi kekuatan.
- 3) Kapasitas angkutan laut dan udara strategis, sebagai wahana untuk melaksanakan proyeksi kekuatan.

Dalam masa perang, proyeksi kekuatan dapat dilaksanakan untuk

menguasai atau merebut kembali wilayah yang dikuasai lawan, melaksanakan aksi pembalasan (*retaliation*) terhadap serangan pada kepentingan nasional Indonesia, atau melakukan intervensi militer untuk melindungi kedaulatan negara.



**Gambar 1. Proyeksi Kekuatan di era revolusi industri 4.0**

Sumber : Srena Mabesal, pokja penajaman MEF tahun 2017

d. Keamanan maritim (*Maritime security*). Penggunaan kekuatan pertahanan maritim nasional untuk keamanan laut bertujuan melindungi kedaulatan negara dan sumber daya nasional dan keselamatan pengguna laut dari ancaman. Berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan laut antar lain terorisme maritim, kejahatan lintas negara melalui laut, kekerasan dan kriminalitas, imigrasi ilegal, kerusakan lingkungan laut, dan penyalahgunaan sumberdaya nasional di laut.

Kekuatan pertahanan maritim digunakan untuk melindungi kedaulatan negara dan keamanan di laut secara sinergis dengan berbagai instansi pemangku kepentingan (*stake holder*) di wilayah laut yurisdiksi nasional. Kebijakan pemerintah untuk membentuk dan memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai instansi yang mengkoordinasikan kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di laut merupakan suatu langkah maju yang bertujuan meningkatkan efisiensi.

## **2. Kemampuan Teknologi Komando, Kendali, Komputer, Komunikasi, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP).**

Dengan luas laut wilayah Indonesia yang begitu luas maka dibutuhkan teknologi pertahanan maritim yang memiliki keandalan serta keahlian maupun keterampilan para pengawaknya. Pemahaman terhadap cara pandang wawasan nusantara terhadap kemaritiman tersebut telah menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan *Maritime Domain Awareness* (MDA). MDA sebagai suatu pemahaman terhadap apapun yang terkait dengan lingkup maritim yang dapat mempengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi, dan lingkungan dari wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Cara pandang lingkup maritim yang terdapat pada MDA telah menimbulkan pemikiran terhadap pemutakhiran kemampuan teknologi yang berkaitan dengan K4IPP. Pengembangan jaringan dan teknologi sebagai suatu sistem pengawasan wilayah laut Indonesia selain membutuhkan teknologi canggih seperti dukungan satelit dan pesawat nirawak (*drone*) juga membutuhkan para pengawak yang memiliki kecakapan dan keahlian tinggi dalam pengoperasian teknologi yang dimaksud. SDM pertahanan memegang peranan penting dalam penguasaan teknologi tersebut. Untuk membangun dan membina kemampuan tersebut maka diperlukan kerjasama dan sinergi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga didapatkan keluaran SDM yang kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan ke depan khususnya yang berkaitan dengan visi PMD dan penegakkan kedaulatan NKRI. Hal ini kembali kepada peran lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menghasilkan hasil didik yang dapat berkiprah di dalam beberapa organisasi

yang terlibat secara langsung dalam bidang pertahanan negara (Anwar, 2015).

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperlukan Strategi Pertahanan maritim yang kuat yang didukung dengan Komando, Kendali, Komputer, Komunikasi, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP) yang terintegrasi

#### **Integrasi Pertahanan Udara.**

Fungsi Komando dan Kendali yang dimaksudkan akan mengarah lebih kepada Komando dan Kendali Pertahanan Udara dimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara-negara NATO telah mengefektifkan fungsi kodal hanud tersebut dengan menggunakan pesawat *Airborne Warning and Control System* (AWACS) maupun piranti lunak canggih lainnya, Selain fungsi kodal hanud yang diambil dari K4IPP tersebut, adalah radar hanud yang akan diefektifkan untuk fungsi pengamatan dan pengintaian, dimana sudah seharusnya pertahanan udara nasional Indonesia dilengkapi oleh radar hanud maupun *mobile early warning* dari kapal perang maupun radar bergerak di darat. Yang perlu diingat adalah, kekuatan pertahanan udara dengan model terpadu tiga matra dalam bentuk K4IPP ini diharapkan dapat sinergi dalam menyatukan kekuatan pertahanan nasional yang terpusat dalam satu komando sehingga akan menghasilkan efek signifikan daripada kekuatan pertahanan terpisah

#### **Pertahanan Udara Aktif.**

Operasi pertahanan udara aktif dengan meng-integrasikan sistem pertahanan udara gabungan ke dalam sistem C4I dapat mendukung keberhasilan operasi secara utuh. Komandan dari tiap-tiap satuan mempertahankan wilayah tugasnya dengan pertahanan aktif dan melakukan tindakan pengendalian wilayah udara untuk melindungi pasukan kawan terhadap ancaman dari

udara serta prioritas dari serangan rudal. Pertahanan udara aktif juga berfungsi untuk melindungi aset geopolitik dengan menghancurkan pesawat musuh yang mengancam masuk ke dalam wilayah Nasional, mengancam rudal musuh yang sengaja ditempatkan menuju aset strategis negara, dan menghancurkan UAV negara musuh yang bertujuan untuk memata-matai daerah dan wilayah nasional Indonesia Terlepas dari upaya-upaya yang disiapkan dalam pertahanan wilayah udara, semua kekuatan udara dan pertahanan rudal harus siap mengidentifikasi semua pesawat di daerah tersebut dengan cara elektronik, visual, ataupun prosedural.

**Kontrol Ruang Udara.** Kontrol ruang udara nasional sangat penting untuk semua operasi udara dan memiliki suatu prosedur untuk memfasilitasi rute serta pemberian ijin melintas terhadap pesawat yang tidak mengancam. Indonesia di dalam wilayah ruang udara telah memiliki ADIZ (*Air Defence Identification Zone*) sebagai sarana untuk menentukan rute non-tempur lalu lintas udara yang direncanakan untuk mengoptimalkan sumber daya pertahanan udara dan meminimalkan pembatasan operasi lainnya.

### **3. Pembangunan sarana prasarana dalam mendukung gelar kekuatan di laut Natuna utara.**

Terciptanya kondisi sarana dan prasarana yang diharapkan adalah sesuatu yang realistis untuk dilaksanakan. Karena untuk menjadi bangsa maritim dan menjadi poros maritim dunia maka beberapa sarana dan prasarana harus terpenuhi. Diantara sarana dan prasarana yang sangat diperlukan untuk menunjang kekuatan pertahanan maritim adalah

a. Pelabuhan.. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan

membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh:

1) Fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi :

- a) Alih muat antar kapal
- b) Dermaga
- c) Terminal penumpang
- d) Pergudangan
- e) Lapangan penumpukan
- f) Terminal peti emas, curah cair, curah kering dan RO-RO
- g) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
- h) Fasilitas bunker
- i) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- j) Jaringan jalan dan rel kereta api
- k) Fasilitas pemadam kebakaran
- l) Tempat tunggu kendaraan bermotor
- m) Perairan tempat labuh Kolam labuh

2) Fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi :

- a) Kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
- b) Sarana umum;
- c) Tempat penampungan limbah;
- d) Fasilitas pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
- e) Fasilitas perhotelan dan restoran ;
- f) Areal pengembangan pelabuhan;
- g) Kawasan perdagangan;
- h) Kawasan industri.

b. Industri Maritim

1) Industri Maritim mampu memberdayakan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan

pengembangan kekuatan pertahanan negara sehingga akan menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil ketergantungan dalam bidang pertahanan.

2) Kemampuan dan pendayagunaan industri nasional, serta penguasaan dan persiapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pertahanan negara.

3) Mampu mengembangkan industri pertahanan yang dilakukan dengan komitmen bersama antara pemerintah, pengguna, industri dan unsur pendukung lainnya.

c. Industri Pertahanan

Industri pertahanan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan suatu negara dalam hal kemandirian teknologi pertahanan. Oleh karena itu industri pertahanan harus dapat dikembangkan sehingga mampu mendukung Indonesia menjadi negara maritim. Industri pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kekuatan pertahanan suatu negara, terlebih dalam era modern sekarang ini. Negara yang memiliki industri pertahanan yang maju akan mempunyai kemampuan lebih dalam kekuatan pertahanannya. Kekuatan pertahanan suatu negara akan lebih mumpuni bila ditunjang dengan kemampuan negara tersebut memproduksi berbagai macam sarana dan prasarana pendukung pertahanan melalui industri pertahanan yang dimilikinya.

Logistik Henry E. Eccless dalam bukunya "*Logistic in the National Defence*" membahas masalah logistik

secara luas, terutama dalam hubungan antara strategi, logistik dan taktik<sup>12</sup>.

- a. Strategi; berhubungan dengan cara, sarana yang digunakan oleh pemimpin (umumnya pemimpin militer) untuk mencapai tujuan, misalnya dari suatu kegiatan militer yaitu untuk memenangkan peperangan.
- b. Taktik; berhubungan dengan pengerahan kekuatan atau penggunaan persenjataan tertentu dari kesatuan tempur demi tercapainya tujuan strategi.
- c. Logistik; berhubungan dengan penciptaan dan penyelenggaraan dukungan material dan jasa yang berlanjut pada satuan-satuan tempur, untuk personel maupun peralatan tempur yang digunakan.

Dengan demikian, maka logistik sangat berhubungan erat dengan penentuan tujuan dan cara untuk mencapainya, termasuk pada penyelenggaraan dukungan berlanjut yang berada di pulau terluar. Strategi dan taktik memberikan penyelenggaraan operasi militer, sedangkan logistik adalah yang menyediakan dukungan fasilitas atau sarana yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat.

## SIMPULAN

1. Dalam menerapkan Strategi Pertahanan Maritim perlu adanya Penerapan strategi pertahanan maritim TNI Angkatan Laut dengan didukung gelar kekuatan yang optimal dalam penggunaan kekuatan maritim yaitu penagkalan, pengendalian laut, proyeksi kekuatan dan keamanan

- maritim untuk dapat menerapkan Strategi Pertahanan Maritim yang berlapis dalam rangka mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
2. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperlukan Strategi Pertahanan maritim yang kuat yang didukung dengan Komando, Kendali, Komputer, Komunikasi, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP) yang terintegrasi dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi tersebut. Untuk membangun dan membina kemampuan tersebut maka diperlukan kerjasama dan sinergi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga didapatkan keluaran SDM yang kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan ke depan khususnya yang berkaitan dengan visi PMD dan penegakkan kedaulatan NKRI.
3. Untuk mewujudkan pilar-pilar yang terdapat pada PMD tidak cukup hanya dengan menggelar operasi tetapi juga dibutuhkan kegiatan selain dalam bentuk operasi pembinaan potensi maritim. Pilar PMD dan Strategi maritim saling mendukung. Pola keterkaitan ini ditunjukkan pada pilar ke tiga PMD yaitu pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau tidak akan berjalan baik tanpa didukung pertahanan

dan keamanan maritim, sehingga Strategi pertahanan maritim yang memiliki *ends* atau tujuan membangun pertahanan dan menjaga kedaulatan maritim menjadi elemen penting bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau.

dalam rangka Menghadapi Peperangan Masa Depan. Jurnal Pertahanan April 2015, volume 5, nomor 1. Jakarta: Universitas Pertahanan

Subijanto, S. (2005). Artikel Kasal mengenai Gagasan tentang Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (SPMI) sebagai Strategi Pertahanan Negara Kepulauan. Majalah SATRIA, Departemen Pertahanan (2<sup>nd</sup>ed).

## DAFTAR PUSTAKA

Arthur Lykke, "Defining Military Strategy" (1997). dalam Military Review No 77 Vol. 1

BBC.News Indonesia. AS dan China: Mengapa hubungan mereka lebih dari sekadar 'Perang Dingin kedua?', diakses tanggal 07 Mei 2021 pkl 19.00, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56412423>

Bhatnagar, T. Mengapa Indonesia menambah kekuatan militer di Natuna?. (2016, ).diakses tanggal 7 Mei 2021 pukul 22.00 WIB, [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/15130\\_duniaindonesia\\_natuna](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/15130_duniaindonesia_natuna).

Estu Prabowo, "Jurnal Ketahanan Nasional", 2013 : 125-126

Henry. E. Eccles, Logistics in the National Defense, Harrisburg, Pensylvania, The Stackpole Company, 1959.59

Kementerian Pertahanan RI. Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 27 Tahun 2014 tentang Postur Pertahanan Negara

Kementerian Pertahanan RI, "Strategi Pertahanan Negara", Jakarta, 2007, 52.

Ken Booth. Navies and Foreign Policy (London: Croom Helm, 1977),15.

Markas Besar Angkatan Laut. (2016, Mei 27).Kebijakan Perencanaan TNI Angkatan Laut Tahun 2017.Keputusan Kasal No. Kep/1424/V/2016.

Paket Instruksi Pendidikan Reguler Seskoal. (n.d.). Mata Pelajaran Sea Power.Jakarta, 84

S. Anwar, .Penguasaan Teknologi Pertahanan oleh SDM Pertahanan Indonesia